

Nomor : 44/PM.02.02 /K.JI-30/06/2026
Lampiran : 1 (satu) bandel
Sifat : Penting
Perihal : **SARAN PERBAIKAN**

22 Juni 2026

Yth. Ketua KPU Kota Batu
di –

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang – Undang;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
6. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Batu Nomor: 22/RT.02/K.JI-30/06/2026, tertanggal 17 Juni 2026.

B. SARAN PERBAIKAN

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan melalui koordinasi dengan Pemerintah Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo selama masa pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, ditemukan sebanyak 10 (sepuluh) orang pemilih yang telah meninggal dunia dengan bukti dukung berupa Akta Kematian yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Batu dan Surat

Keterangan Kematian terbitan Pemerintahan Desa Junrejo, sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kota Batu memberi **SARAN PERBAIKAN** kepada KPU Kota Batu, untuk melakukan pencermatan dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya yang baik disampaikan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota
Batu,



Supriyanto, S.Pd

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.